

**EVALUASI PENETAPAN PUSAT PERTUMBUHAN KAWASAN
WILAYAH PENGEMBANGAN (WP) PURWOMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Strata I
pada Jurusan Geografi Fakultas Geografi**

**Oleh:
UBAIDILLAH ROSYID
E 100 150 128**

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EVALUASI PENETAPAN PUSAT PERTUMBUHAN KAWASAN
WILAYAH PENGEMBANGAN (WP) PURWOMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

UBAIDILLAH ROSYID

E 100 150 128

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:
Dosen Pembimbing**



Dr. Choirul Amin, S.Si., M.M.
NIDN: 0617107602

HALAMAN PENGESAHAN

**EVALUASI PENETAPAN PUSAT PERTUMBUHAN
KAWASAN WILAYAH PENGEMBANGAN (WP)
PURWOMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH**

OLEH
UBAIDILLAH ROSYID
E100150128

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Geografi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 12 April 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **Dr. Choirul Amin, S.Si., M.M.**
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. **Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si.**
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. **M. Iqbal T. Sunariya, M.Sc., MURP**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Dekan,

Drs. Yuli Privana, M.Si.

NIK. 573

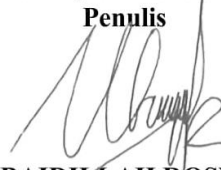
PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Februari 2021

Penulis



UBAIDILLAH ROSYID

E100150128

EVALUASI PENETAPAN PUSAT PERTUMBUHAN KAWASAN WILAYAH PENGEMBANGAN (WP) PURWOMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Menganalisis pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah kawasan WP Purwomanggung; 2) Menganalisis apa yang menjadi sektor dan sub-sektor ekonomi unggulan masing-masing daerah di WP Purwomanggung; 3) Menganalisis daerah mana yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan alternatif di kawasan WP Purwomanggung; dan 4) Mengevaluasi dan merencanakan pengembangan wilayah di kawasan WP Purwomanggung berupa rekomendasi kepada pemangku kebijakan. Metode analisis data yang digunakan adalah Tipologi Klassen untuk menganalisis pola dan struktur pertumbuhan ekonomi, analisis Location Quotient (LQ) untuk menganalisis sektor ekonomi unggulan, analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas untuk menganalisis pusat pertumbuhan di WP Purwomanggung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015-2019 di WP Purwomanggung cenderung fluktuatif antara kuadran III (berkembang cepat) dan kuadran IV (relatif tertinggal) di beberapa daerah seperti di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang. Sementara Kabupaten Purworejo konsisten di kuadran III, Kabupaten Temanggung konsistiten di kuadran IV, dan Kota Magelang konsisten di kuadran I (cepat maju dan tumbuh); 2) Terdapat 2 (dua) sektor yang menjadi sektor basis di seluruh Kabupaten/Kota WP Purwomanggung, yakni sektor transportasi dan pergudangan dan sektor jasa lainnya. Sementara itu terdapat 5 sektor yang menjadi sektor basis di 4 daerah, yakni; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estat; dan sektor jasa pendidikan; 3) Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang potensial menjadi pusat pertumbuhan alternatif (hierarki I) jika ditinjau dari jumlah dan kelengkapan fasilitas pelayanan; dan 4) Penentuan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo sebagai pusat pertumbuhan alternatif menjadi salah satu tawaran solusi, dengan catatan 2 daerah tersebut memaksimalkan beberapa sektor non-basis agar dapat menjadi basis baru sebagai upaya mengangkat status pertumbuhan ekonomi dari relatif tertinggal menjadi maju dan berkembang. Dengan demikian, beban pusat pertumbuhan tidak ditopang oleh satu wilayah saja (Kota Magelang) sehingga tercipta pemerataan pembangunan.

Kata Kunci: Disparitas Pembangunan, Perencanaan Wilayah, Purwomanggung, Pusat Pertumbuhan.

Abstract

The purposes of this research are; 1) Analyze structure and pattern of economic growth in each region Development Area of Purwomanggung, 2) Analyze sector and sub-sector of superior economic in each region Development Area of Purwomanggung, 3) Analyze potentially area that would be alternative center of growth in Development Area of Purwomanggung, and 4) Evaluate and planning region development in Development Area of Purwomanggung through of

recommendation for functionary policy. Analyzes data method utilise Typology Klassen for analyze structure and pattern of economic growth, Location Quotient (LQ) for analyze superior economic sector, Scalogram and Centality Index for analyze center of growth in Development Area of Purwomanggung. The research's result point out; 1) Structure and pattern of economic growth as long 2015-2019 in Development Area of Purwomanggung inclined fluctuate between quadrant III (quick efflorescent) and quadrant IV (relative fall behind) in some region such as Wonosobo Regency and Magelang Regency, meanwhile Purworejo Regency consistent on quadrant III, Temanggung Regency consistent on quadrant IV, and Magelang City consistent on quadrant I (sprout up and thriving), 2) Two sector was exist as basis sector either City or Regency in Development Area of Purwomanggung which is transportation sector and commerce and other service sector, meanwhile five sector that become basis sector in four region are: agriculture, forestry, and fishery sector; retail and large commerce, car and bicycle repair sector; insurance and finances sector; real estate sector; and education sector, 3) Wonosobo and Magelang Regency are potentially become alternative center of growth (hierarchy I) reviewed by quantity and completeness of service facilities, 4) Determination Wonosobo and Magelang Regency as alternative center of growth is one of solution that was offered, which also provide supporting documentation that the two regencies maximise some non-basic sector that could be new basic as means adapt economic growth status from relative fall behind to sprout up and thriving. Therefore, the burden of central of growth is not only supported by a region (Magelang City) to reach even distribution of development.

Keywords: Development Disparity, Region Planning, Purwomanggung, Center of Growth

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019, sistem pewilayahan di Jawa Tengah terbagi kedalam 8 Wilayah Pengembangan (WP), dimana salah satunya adalah WP Purwomanggung dengan Kota Magelang sebagai pusatnya. Kebijakan Pemerintah mengenai pewilayahan/regionalisasi ini tentu mengharap adanya trickle down effect, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai. Namun pada kenyataannya masih terdapat disparitas pembangunan antara pusat dengan hinterland disekitarnya. Ada kecenderungan terjadi backwash effect jika kesenjangan masih terjadi, yakni pengurasan sumber daya secara berlebihan dari wilayah hinterland.

Penelitian ini mencoba mengevaluasi kembali apakah Kota Magelang masih relevan sebagai pusat pertumbuhan. Berdasarkan kaji literatur penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa masukan mengenai Kota

Magelang sebagai pusat pertumbuhan WP Purwomanggung. Retno (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengembangan Kota Magelang Sebagai Pusat Pertumbuhan Kawasan Purwomanggung Jawa Tengah menyimpulkan sebuah temuan hasil penelitian bahwa interaksi ekonomi Kota Magelang dengan daerah disekitarnya lemah. Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo menunjukkan indeks gravitasi yang lemah dengan Kota Magelang sehingga pemerataan pembangunan sulit dicapai di daerah tersebut, efek trickle down juga kurang maksimal. Maka dari itu, penentuan Kota Magelang sebagai pusat pertumbuhan dinilai kurang maksimal karena hanya dengan pertimbangan ekonomi, mengabaikan kekuatan interaksi antardaerah dan laju pertumbuhan. Penelitian berikutnya yang melakukan evaluasi adalah Yasinta, dkk (2019). Dalam penelitian tersebut mengungkapkan ketimpangan pembangunan di kawasan Purwomanggung tahun 2008 – 2017 melalui perhitungan Indeks Williamson masih tergolong tinggi. Ketimpangan pembangunan tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di kawasan Purwomanggung.

Perbandingan data-data diatas menunjukkan bahwasanya masih perlunya peninjauan kembali terhadap kebijakan pembangunan yang ada di kawasan Purwomanggung dengan cara menganalisis potensi-potensi daerah, terkhusus dari pola dan struktur ekonomi, fasilitas pelayanan, hingga sektor prioritas dan non-prioritas untuk mencapai pembangunan wilayah yang optimal dan merata. Sehingga substansi dari perencanaan dan pembangunan wilayah yakni kesejahteraan rakyat pun dapat tercapai.

Geografi sebagai disiplin ilmu mempunyai tiga pendekatan dalam memandang fenomena. Analisa keruangan menjadi pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Bintarto dan Surastopo (1979) mengatakan bahwa ada dua hal dalam analisis keruangan yang perlu untuk diperhatikan, yakni ketersediaan ruang untuk digunakan dalam suatu perencanaan dan persebaran penggunaan lahan yang sudah ada. Sedangkan wilayah dengan pusat pertumbuhan lama kelamaan akan berkembang sesuai dengan teori expansion diffusion.

Alternatif penataan ruang dengan menganalisis kembali potensi kecamatan

sebagai pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan daerah dapat dilakukan sebagai solusi. Sebagaimana teori kutub pertumbuhan (growth pole) yang dipaparkan oleh Francois Perroux dan konsep pertumbuhan pada hipotesa Bintarto (1983), bahwa awal mula dan puncak pembangunan ekonomi terjadi pada pusat-pusat tertentu, serta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah dijalankan melalui pusat-pusat pertumbuhan.

Penelitian ini berfokus pada mengusahakan distribusi pembangunan wilayah yang merata sebagai tujuan ideal. Penentuan pusat pertumbuhan dalam pengembangan wilayah adalah salah satu upaya pemerataan pembangunan dengan lebih mengutamakan hubungan antara pusat pertumbuhan dengan daerah berikutnya sekaligus mengevaluasi serta merencanakan bagaimana seharusnya kebijakan dapat diterapkan berbasis potensi wilayah kecamatan di setiap Wilayah Pengembangan (WP). Sehingga dari konsep tersebut diharapkan mampu memperoleh tujuan dari hakikat pembangunan dan perencanaan wilayah itu sendiri.

2. METODE

2.1 Metode Pengumpulan Data

Penelitian kali ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dinas atau instansi terkait berupa data spasial maupun data tekstual. Data tersebut dikumpulkan dengan cara mendatangi dinas terkait dan atau secara tidak langsung melalui website resmi dinasi terkait.

2.2 Teknik Pengolahan Data

Setelah data didapatkan, maka data tersebut perlu diolah untuk memperoleh hasil hingga kemudian dilanjutkan ke dalam tahap analisis. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengolahan data, yakni teknik analisis Tipologi Klassen, Location Quotient (LQ), dan Skalogram. Berikut tahapan teknik pengolahan data secara lebih terperinci:

2.2.1 Tipologi Klassen

Teknik analisis *Klassen Tipology* (Tipologi Klassen) untuk keperluan menggambarkan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi pada masing-masing Kabupaten/Kota di WP Purwomanggung. Dua indikator utama yang digunakan

dalam analisis ini adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota terkait (sebagai sumbu vertikal) dan pendapatan perkapita Kabupaten/Kota terkait (sebagai sumbu horizontal). Output dari analisis ini berupa empat karakteristik dari pola dan struktur pertumbuhan ekonomi, yakni daerah relatif tertinggal (*low growth dan low income*), daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*). (Kuncoro dan Aswandi, 2002).

Tabel 1 Klasifikasi Tipologi Klassen

Kuadran III Daerah berkembang cepat $G_i > G, G_{ki} < K$	Kuadran I Daerah cepat maju dan cepat tumbuh $G_i > G, G_{ki} > K$
Kuadran IV Daerah relatif tertinggal $G_i < G, G_{ki} < K$	Kuadran II Daerah maju tapi tertekan $G_i < G, G_{ki} > K$

Sumber: Sjafrizal, 2008

Keterangan:

G_i = Laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota i

G_{ki} = Pendapatan perkapita di Kabupaten/Kota i

G = Laju pertumbuhan PDRB di daerah acuan

K = Pendapatan perkapita di daerah acuan

2.2.2 Location Quotient (LQ)

Teknik analisis ini berlandaskan pada teori *economic base* (basis ekonomi). LQ dapat digunakan sebagai identifikasi awal kapabilitas sektor dalam konteks pembangunan wilayah. Output dari analisis ini adalah sektor-sektor yang mampu melayani pasar ekspor (sektor basis), hal tersebut menjadi indikator yang dapat menunjukkan bagaimana peranan sektor bersangkutan dalam perekonomian wilayah jika dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah acuannya. (Muta'ali, 2015).

Rumus *Location Quotient* (LQ) adalah sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/RV_j}{X_i/RV} \quad \text{atau} \quad LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/RV_{ij}}{X_i/RV} \quad (1)$$

Keterangan:

LQ_{ij} = Indeks/koeffisien LQ sektor i kecamatan j di Kabupaten Magelang

- X_{ij} = PDRB sektor i di Kabupaten/Kota j
 X_i = PDRB sektor i di Provinsi Jawa Tengah
 RV_j = Total PDRB Kabupaten/Kota j
 RV = Total PDRB Provinsi Jawa Tengah

a. Interpretasi

Jika nilai LQ pada suatu sektor semakin tinggi, maka semakin tinggi pula *comparative advantages* pada daerah tersebut untuk dikembangkan. Analisis LQ ini dapat dikaitkan dengan tingkat spesialisasi sektor tertentu dan penafsirannya untuk identifikasi sektor basis. Dua hal tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut: (Muta'ali, 2015).

Tabel 2 Penafsiran Nilai Indeks *Location Quotient* (LQ)

Nilai LQ	Penafsiran *)		
	Sektor basis/unggulan/potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
LQ>1	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Ekspor, melayani pasar dalam dan luar daerah
LQ<1	Sektor non basis/non unggulan/tidak potensial	Sektor tidak terspesialisasi	Non ekspor, belum mampu melayani pasar luar daerah
LQ=1	Sektor seimbang dengan wilayah referensi	Spesialisasi sama dengan wilayah referensi	Non ekspor, hanya mampu melayani pasar didalam wilayah

Sumber: Muta'ali, 2015

*) pemakaian penafsiran tergantung pada tujuan analisis

2.2.3 AHP dengan Skalogram dan Indeks Sentralitas

Teknik analisis ini digunakan untuk identifikasi penyebaran fasilitas pelayanan serta bagaimana tingkat hirarki dari fasilitas pelayanan tersebut. Hirarki wilayah berdasarkan fasilitas pelayanan diurutkan dari jumlah paling banyak hingga sedikit, sehinggalah urutan tersebut dapat ditentukan mana daerah yang dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. (Muta'ali, 2015)

Analisis Indeks Sentralitas (Centrality Index Analysis) merupakan langkah lanjutan dari analisis skalogram. Analisis ini juga dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hierarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak jumlah fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan

berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah pemukiman. (Muta'ali, 2015)

Menurut Tarigan (2005) untuk mengetahui klasifikasi hirarki maka akan menggunakan metode *Sturges*, dengan rumus:

$$k = 1 + 3,3 \log n \quad (2)$$

Keterangan:

k = Banyaknya kelas

n = Banyaknya kecamatan

Selanjutnya adalah menentukan interval tiap kelas dengan rumus:

$$Interval = \frac{A-B}{k} \quad (3)$$

Keterangan:

A = Jumlah nilai fasilitas tertinggi

B = Jumlah nilai fasilitas terendah

k = Banyaknya kelas

2.3 Metode Analisis Data

Sebagai bagian dari metode utama sebuah penelitian, aspek analisis data dapat diberdakan menjadi 3 maca pendekatan, yakni pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix). (Yunus, 2016)

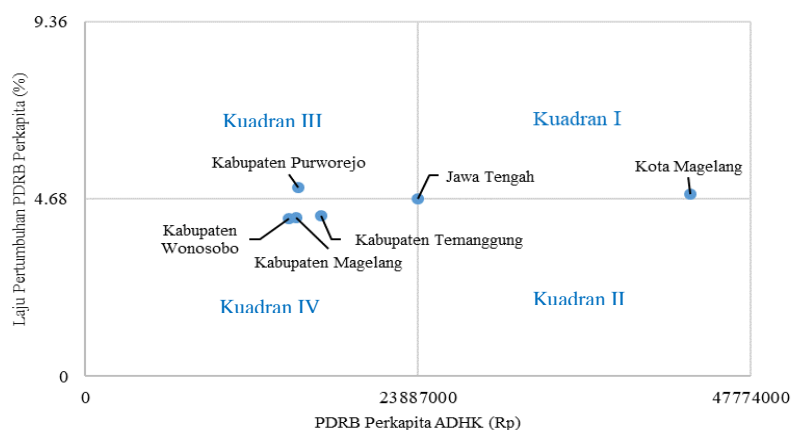
Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Winchester (2000) dalam Yunus (2016) analisis kualitatif dalam konteks penelitian wilayah didefinisikan sebagai metode untuk dapat menjelaskan kondisi lingkungan manusia dan atau fisik yang berkaitan dengan gejala-gejala geosfer di permukaan bumi. Dari data yang sudah diolah berupa angka-angka, diagram, grafik yang berasal dari analisis Tipologi Klassen, *Location Quotient*, dan Skalogram kemudian diterjemahkan menjadi deskripsi-deskripsi hasil. Metode analisis ini berusaha mencari makna dibalik data-data yang telah tersedia secara deskriptif untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi WP Purwomanggung

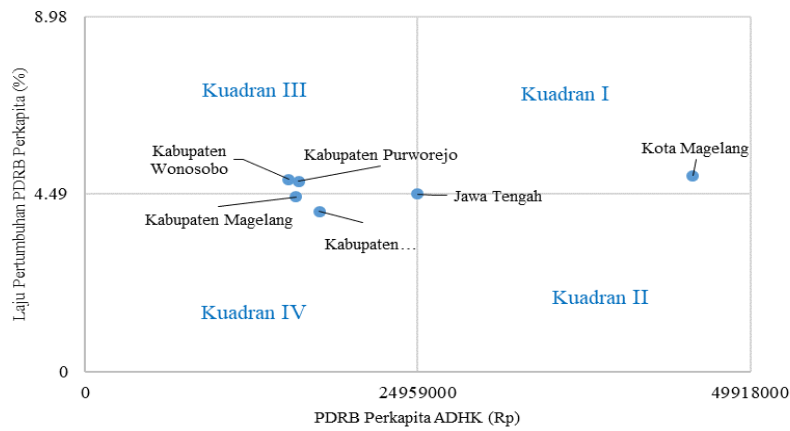
Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo tergolong daerah yang berkembang cepat berturut-turut 2015 – 2019, artinya perkembangan masih

stagnan dan belum beranjak menuju daerah cepat maju dan tumbuh. Laju pertumbuhan PDRB Perkapita sudah melampaui Provinsi Jawa Tengah, namun untuk PDRB Perkapita belum bisa melampaui. Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori relatif tertinggal pada tahun 2015 dan 2017 dan kategori berkembang cepat masing-masing tahun 2016, 2018, dan 2019. Perkembangan ekonomi wilayah daerah ini dapat dikatakan tidak stabil naik ataupun turun, namun fluktuatif. Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2015 – 2019 juga mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain tahun 2017 (daerah berkembang cepat), daerah ini masuk dalam kategori relatif tertinggal dimana laju pertumbuhan dan nilai PDRB Perkapita berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Padahal secara aksesibilitas paling dekat dengan Kota Magelang yang relatif maju sekaligus sebagai pusat pertumbuhan (Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019). Sementara Kabupaten Temanggung menjadi daerah di WP Purwomanggung dengan kategori relatif tertinggal dalam periode waktu 2015 – 2019. Laju pertumbuhan dan nilai PDRB Perkapita selalu di bawah Kabupaten/Kota lain di WP Purwomanggung dan Provinsi Jawa Tengah. Terakhir, Kota Magelang menjadi satu-satunya daerah yang konsisten berada di kategori cepat maju dan cepat tumbuh selama 2015 – 2019. Secara umum, masih terjadi ketimpangan antar wilayah di WP Purwomanggung, terlebih Kota Magelang dengan daerah sekitarnya. Berikut adalah gambar diagram hasil penghitungan dari teknik analisis Tipologi Klassen (2015 – 2019):



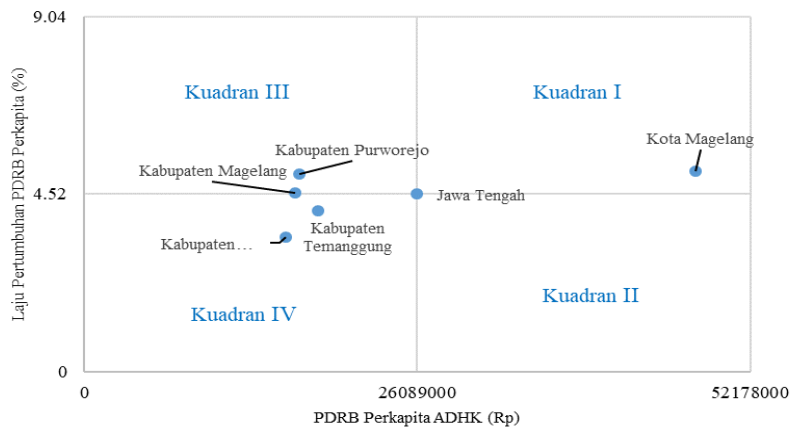
Gambar 1. Diagram Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di WP Purwomanggung, 2015

Sumber : BPS, diolah oleh penulis



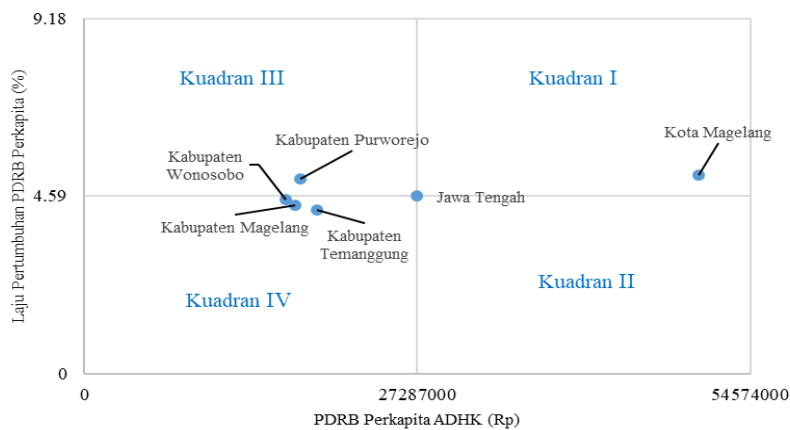
Gambar 2. Diagram Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di WP Purwomanggung, 2016

Sumber : BPS, diolah oleh penulis



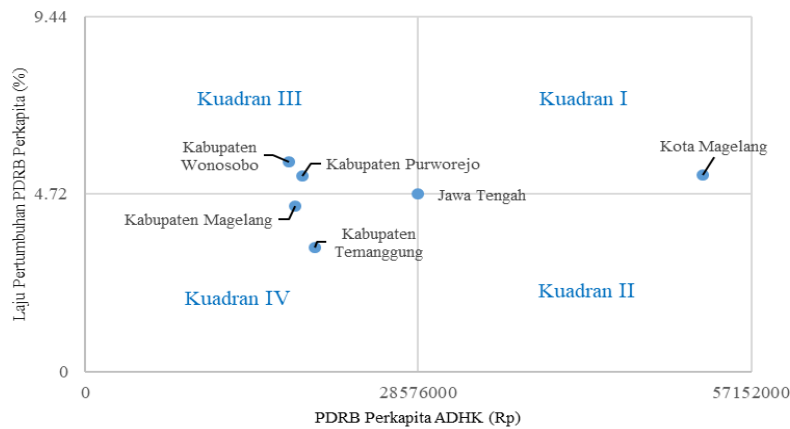
Gambar 3. Diagram Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di WP Purwomanggung, 2017

Sumber : BPS, diolah oleh penulis



Gambar 4. Diagram Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di WP Purwomanggung, 2018

Sumber : BPS, diolah oleh penulis



Gambar 5. Diagram Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di WP Purwomanggung, 2019

Sumber : BPS, diolah oleh penulis

3.2 Analisis Sektor Unggulan

Penghitungan LQ menggunakan data PDRB ADHK, karena nilai PDRB ini dapat digunakan sebagai acuan secara riil bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun tanpa terpengaruh oleh faktor harga yang berubah-ubah, karena PDRB ini menggunakan tahun dasar, yakni tahun 2010 sesuai dengan rekomendasi BPS

Berikut adalah hasil penghitungan nilai LQ Kabupaten/Kota di WP Purwomanggung:

Tabel 3 Hasil Penghitungan Nilai LQ Berdasarkan Nama Daerah, 2019

No	Nama Daerah	Kategori Sektor Basis	Jumlah Basis
1	Kota Magelang	D, E, F, G, H, I, J, K, L, O, P, Q, R, S, T, U	16
2	Kabupaten Magelang	A, B, E, G, H, I, J, L, O, P, R, S, T, U	14
3	Kabupaten Purworejo	A, E, H, J, K, L, O, P, Q, R, S, T, U	13
4	Kabupaten Wonosobo	A, E, G, H, I, K, L, P, Q, R, S, T, U	13
5	Kabupaten Temanggung	A, E, G, H, K, Q, R, S, T, U	10

Sumber : BPS, diolah oleh penulis

Keterangan Kategori Sektor:

- A : Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- B : Sektor Pertambangan dan Penggalian
- C : Sektor Industri Pengolahan
- D : Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
- E : Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
- F : Sektor Konstruksi

- G : Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
H : Sektor Transportasi dan Pergudangan
I : Sektor Penyediaan Akomodasi Air Minum
J : Sektor Informasi dan Komunikasi
K : Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi
L : Sektor Real Estat
M, N : Sektor Jasa Perusahaan
O : Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial
Wajib
P : Sektor Jasa Pendidikan
Q : Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R, S, T, U : Sektor Jasa Lainnya

Tabel 3 menunjukkan Kota Magelang menjadi daerah dengan sektor basis terbanyak dengan 16 kategori, dimana penyumbang pendapatan terbanyak adalah pada sektor konstruksi, sektor yang tidak menjadi basis di daerah lainnya. Namun Kota Magelang lemah di sektor yang membutuhkan luasan lahan seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Magelang dengan 14 sektor basis, Kabupaten Purworejo dan Wonosobo masing-masing 13 sektor, serta Kabupaten Temanggung dengan 10 sektornya menjadi basis.

Tabel 4 Hasil Penghitungan Nilai LQ Berdasarkan Kategori Sektor Basis, 2019

Kategori Sektor Basis	Nama Daerah	Jumlah
A	Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung	4
B	Kabupaten Magelang	1
C	-	0
D	Kota Magelang	2
E	Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung	5
F	Kota Magelang	1
G	Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung	4
H	Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung	5
I	Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo	3
J	Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo	3

K	Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung	4
L	Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo	4
M,N	-	0
O	Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo	3
P	Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo	4
Q	Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung	3
R,S,T,U	Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung	5

Sumber : BPS, diolah oleh penulis

Jika dilihat berdasarkan kategori sektor basis (Tabel 4), ada beberapa sektor yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan di WP Purwomanggung, seperti kategori C (sektor industri pengolahan), kategori M, N (sektor jasa perusahaan), kategori D (sektor listrik dan gas), dan kategori F (sektor konstruksi). Sedangkan kategori I, J, O, Q yang menjadi sektor basis di masing-masing 3 daerah perlu dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah terkait. Ada beberapa sektor yang merata menjadi sektor basis di semua daerah seperti sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Transportasi dan Pergudangan.

3.3 Analisis Hierarki Wilayah

Hasil penghitungan Skalogram dan indeks Sentralitas menunjukkan ada 3 kelas hierarki wilayah di WP Purwomanggung, yakni hierarki I, hierarki II, dan hierarki III. Hal ini berdasarkan penghitungan teknik analisis Indeks Sentralitas yang telah diklasifikasikan penggolongannya dengan metode *Sturgess*. Faktor yang mempengaruhi perbedaan hierarki ini adalah kelengkapan serta jumlah fasilitas pelayanan di tiap daerah. Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2019, ada 5 Kabupaten/Kota yang berada pada WP Purwomanggung, yakni Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Setiap daerah memiliki kelengkapan serta jumlah fasilitas masing-masing. Daerah dengan fasilitas pelayanan terlengkap adalah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang, dimana semua fasilitas pelayanan tersedia di daerah tersebut. Perbedaannya adalah di 3 daerah lain tidak

memiliki fasilitas peribadatan Pura. Khusus untuk Kota Magelang ditambah industri besar, karena memang keterbatasan penggunaan lahan. Sedangkan fasilitas dengan jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Magelang dengan total 47.364 unit, diikuti Kabupaten Temanggung 20.382 unit. Industri kecil di 2 daerah ini mempunyai jumlah yang sangat dominan jika dibandingkan dengan daerah lain.

Setelah dilakukan penghitungan, diperoleh nilai indeks sentralitas masing-masing daerah, pada Tabel 5. Jumlah fasilitas terbanyak belum tentu menjadikan daerah tersebut terklasifikasi di hierarki I, karena bobot per fasilitas adalah hasil dari konstanta (100) dibagi dengan jumlah fasilitas secara keseluruhan di semua daerah yang artinya, nilai maksimal bobot hanya 100. Kabupaten Magelang menjadi daerah dengan nilai indeks sentralitas tertinggi, yakni 576,71, diikuti Kabupaten Wonosobo (438,01), Kabupaten Temanggung (411,37), Kabupaten Purworejo (334,75), dan Kota Magelang (139,17). Berdasarkan nilai tersebut, maka range/interval setiap hierarki adalah 145,85. Hierarki I ditempati oleh Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo, hierarki II Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Temanggung, dan hierarki III adalah Kota Magelang.

Tabel 5 Klasifikasi Hierarki Kabupaten/Kota di WP Purwomanggung, 2019

Hierarki	Nilai Indeks Sentralitas	Nama Daerah
I	576,71 – 430,89	Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo
II	285,03 – 430,88	Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung
III	139,17 – 285,02	Kota Magelang

Sumber : BPS, diolah oleh penulis

3.4 Evaluasi dan Rekomendasi untuk Perencanaan Wilayah

Ditinjau dari Perda Nomor 16 tahun 2019, Kota Magelang ditetapkan sebagai pusat pengembangan wilayah lingkup WP Purwomanggung. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian, secara pola dan struktur pertumbuhan ekonomi, daerah tersebut memang cenderung lebih maju dan tumbuh dibanding daerah lain. Namun, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti Kabupaten Magelang yang notabene berada paling dekat dengan mudah secara aksesibilitas

dan mobilitas justru masih dominan sebagai daerah yang relatif tertinggal. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya *trickle down effect* oleh Kota Magelang ke hinterland di sekitarnya. Perlu pusat pertumbuhan pertumbuhan alternatif supaya pengembangan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan masyarakat tidak ditopang oleh satu daerah saja secara sentralistik.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada 2 daerah yang potensial mengambil peran ini, yakni Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo. Jika dilihat dari hasil teknik analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas, daerah-daerah ini termasuk kategori hierarki I, yang artinya memiliki baik jumlah dan kelengkapan fasilitas pelayanan tertinggi dibanding daerah lain. Jika dibandingkan dengan Kota Magelang, 2 daerah ini memiliki daerah yang cukup luas, tipologi daerah yang relatif berkembang, serta beberapa sektor basis yang jika dikembangkan dapat dikembangkan untuk menunjang ekonomi wilayah. Sedangkan Kota Magelang jika ditinjau dari penggunaan lahan, 60 % lebih luasan lahan digunakan untuk pekarangan.

Potensi pengembangan wilayah di Kota Magelang, banyak mengalami kendala terkait dengan keterbatasan lahan. Data dari Kantor Pertanahan Kota Magelang mencatat adanya perubahan alih fungsi lahan di tahun 2019 seluas 42 Ha Meningkatnya alih fungsi lahan setiap tahun memberi tantangan bagi jaminan ketahanan pangan Kota Magelang, dampak lain yang ditimbulkan dari segi ekonomi adalah menurunnya PDRB sektor pertanian. Padahal Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 Pasal 74A mengamanatkan semua Kabupaten/Kota WP Purwomanggung masuk ke dalam daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan tersebut bisa berpotensi membuat PDRB sektor jasa konstruksi dan sektor jasa lainnya mengalami peningkatan, namun ada dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti semakin meningkatnya lahan kritis, target Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 % tidak dapat/sulit terpenuhi, semakin sulitnya akses air bersih seiring semakin banyaknya pembangunan dilakukan, serta menurunnya daya dukung aspek lingkungan di Kota Magelang.

Namun, ada permasalahan pertumbuhan ekonomi yang harus diselesaikan terlebih dahulu baik di Kabupaten Magelang maupun Kabupaten Wonosobo.

Seperti memaksimalkan beberapa sektor non-basis agar dapat menjadi basis baru sebagai upaya mengangkat status pertumbuhan ekonomi dari relatif tertinggal menjadi maju dan berkembang. Dengan demikian, pusat pertumbuhan alternatif menjadi salah satu solusi supaya beban tidak ditopang oleh satu wilayah saja sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Paradigma ini yang selanjutnya dapat dijadikan evaluasi sekaligus rekomendasi yang substansial untuk perencanaan wilayah khususnya di WP Purwomanggung. Karena untuk mencapai pemerataan pembangunan wilayah, pemangku kebijakan perlu melakukan “rekayasa” yang mengarah pada pemerataan, sehingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat terpenuhi.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015-2019 di WP Purwomanggung cenderung fluktuatif antara kuadran III (berkembang cepat) dan kuadran IV (relatif tertinggal) di beberapa daerah seperti di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang. Sementara Kabupaten Purworejo konsisten di kuadran III, Kabupaten Temanggung konsisiten di kuadran IV, dan Kota Magelang konsisten di kuadran I (cepat maju dan tumbuh).
- b. Terdapat 2 (dua) sektor yang menjadi sektor basis di seluruh Kabupaten/Kota WP Purwomanggung, yakni sektor transportasi dan pergudangan dan sektor jasa lainnya. Sementara itu terdapat 5 sektor yang menjadi sektor basis di 4 daerah, yakni; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estat; dan sektor jasa pendidikan. Setiap sektor yang menjadi sektor basis secara otomatis potensial menjadi komoditas ekspor dalam pelayanan pasar ke daerah lain. Hanya ada 2 sektor yang sama sekali tidak menjadi sektor basis di semua daerah WP Purwomanggung, yakni sektor industri pengolahan dan sektor jasa perusahaan.
- c. Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang potensial menjadi pusat

pertumbuhan alternatif (hierarki I) jika ditinjau dari jumlah dan kelengkapan fasilitas pelayanan. Sementara Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Temanggung berada di hierarki II, dan Kota Magelang hierarki III.

- d. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, terdapat kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara Kota Magelang sebagai pusat pengembangan di WP Purwomanggung dengan daerah lainnya. Penentuan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo sebagai pusat pertumbuhan alternatif menjadi salah satu tawaran solusi, dengan catatan 2 daerah tersebut memaksimalkan beberapa sektor non-basis agar dapat menjadi basis baru sebagai upaya mengangkat status pertumbuhan ekonomi dari relatif tertinggal menjadi maju dan berkembang. Dengan demikian, beban pusat pertumbuhan tidak ditopang oleh satu wilayah saja (Kota Magelang) sehingga tercipta pemerataan pembangunan.

4.2 Saran

Berikut merupakan saran berdasarkan hasil analisis dan temuan dalam penelitian ini:

- a. Merekomendasikan kepada pemangku kebijakan untuk menggunakan penelitian ini menjadi suatu perspektif dalam mengevaluasi serta meninjau kembali pembangunan yang telah dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan supaya menjadi referensi untuk merevisi maupun menyusun dokumen perencanaan wilayah seperti RPJMD ataupun RTRW di kemudian hari.
- c. Untuk lingkup akademis, penelitian ini supaya dijadikan sebagai salah satu referensi penelitian selanjutnya, sebagai upaya dalam mengembangkan keilmuan perencanaan wilayah perspektif geografi, baik secara metodologis maupun teoretis.

DAFTAR PUSTAKA

Bintarto, R., & Hadisumarno, S. (1979). *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Bintarto, R. (1983). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta:

Ghalia Indonesia.

Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisa Regional: Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPFM UGM.

Robinson, Tarigan. (2005). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sjafrizal (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.

Yunus, H. (2016). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (2nd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.